

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG
NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN
ZAKAT OLEH BAZ (BADAN AMIL ZAKAT)
DI KABUPATEN NGAWI**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu**

Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2010 080 AS	No. REG : S-2010/AS/088 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh :

**APRIWINDA INTAN PUSPITASARI
NIM : C01206107**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**SURABAYA
2010**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh Apriwinda Intan Puspitasari ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Juli 2010

Pembimbing

Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M. Ag
NIP : 196303271999032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Apriwinda Intan Puspitasari
Nim : C01206107
Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Ahwal As-Syakhsiyah
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999
Tentang Pengelolaan Zakat Oleh BAZ (Badan Amil
Zakat) di Kabupaten Ngawi.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Juli 2010

METERAI
TEMPEL



D7FB8AAF201931154

ENAM RIBU RUPAH

6000

DJP

ya yang menyatakan,

Apriwinda Intan Puspitasari

C01206092

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Apriwinda Intan Puspitasari ini telah dipertahankan di Depan Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari selasa, tanggal 3 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

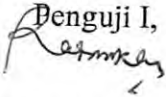
Ketua,


Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M. Ag
NIP. 196303271999032001

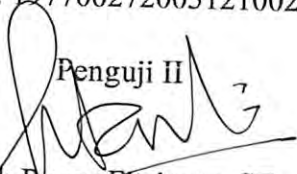
Sekretaris,


Ach. Room Fitrianto, SE
NIP. 1956092319860311002

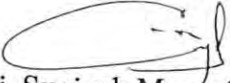
Penguji I,


Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum
NIP. 197706272003121002

Penguji II


Ach. Room Fitrianto, SE
NIP. 1956092319860311002

Pembimbing


Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M. Ag
NIP. 196303271999032001

Surabaya, 3 Agustus 2010

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan



Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

menunaikan zakat, baik zakat fitri maupun zakat Mal. Fenomena keagamaan tersebut sangat terlihat jelas ketika memasuki bulan suci Ramadhan, karena memang waktunya menunaikan zakat fitri.

Terdapat dua kebiasaan masyarakat Ngawi dalam mengeluarkan zakat, pertama dengan cara menyerahkannya kepada tokoh agama kemudian para tokoh agamalah yang bertindak sebagai amil zakat. Kedua dengan secara langsung menyerahkannya kepada mustahik yang bersangkutan. karena sebagian masyarakat merasa tidak puas apabila zakat yang mereka keluarkan tidak langsung diterima oleh *mustahiq* yang bersangkutan.

Dan kebiasaan masyarakat Kabupaten Ngawi ini menyebabkan tidak meratanya penyaluran zakat, sehingga tujuan dari zakat tidak dapat dipenuhi secara maksimal.

Agar efektifitas penyaluran zakat bisa dilaksanakan dan berjalan dengan baik, maka pemerintah perlu membentuk BAZ (Badan Amil Zakat). Pada masa Rasulullah BAZ disebut dengan Baitul Mal. Selain membentuk BAZ upaya pemerintah yakni dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No.

diformulasikan ke dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, kemudian metode penelitian, yang terdiri dari (data yang terkumpul, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data), dan sistematika pembahasan.

BAB II : Pengelolaan Zakat Menurut Undang–Undang Nomor 38 tahun 1999. Bab ini memuat tiga sub bab. Sub bab pertama Penjelasan tentang Latar belakang lahirnya Undang–Undang Nomor 38 Tahun 1999. Sub bab kedua Penjelasan isi Undang–Undang Nomor 38 tahun 1999 terdiri dari tugas dan wewenang BAZ, meliputi pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendayagunaan zakat, dan laporan tahunan, kemudian berisi tentang pengawasan dan sanksi. Sub bab ketiga tinjauan umum tentang amil.

BAB III : Pengelolaan zakat oleh BAZ (Badan Amil Zakat) di Kabupaten Ngawi. bab ini di bagi menjadi empat sub bab. Sub bab pertama memaparkan tentang gambaran umum Kabupaten Ngawi. Sub bab kedua berbicara tentang organisasi pengelolaan zakat. Sub bab ketiga berbicara tentang pengelolaan zakat di Kabupaten Ngawi. Sedangkan sub bab keempat berbicara tentang pengelolaan zakat sebelum dan

1945, memberi kesempatan kepada penyelenggara negara untuk membantu pelaksanaan pemungutan zakat dan pendaayagunaannya. Kenyataan ini dapat dihubungkan dengan jaminan Pasal 29 tentang kebebasan menjalankan *syari'at* agama dan pelaksanaan pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Kata-kata fakir miskin yang dipergunakan dalam pasal tersebut jelas menunjuk pada para *mustahiq* zakat yaitu mereka yang berhak menerima bagian zakat.

Untuk menjadikan zakat sebagai sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut, perlu adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berasaskan iman dan takwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan

Zakat memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.

Dalam pasal 6 ayat 4 menerangkan bahwa pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu. Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan unsur masyarakat adalah mereka yang disebut dengan ulama, kaum cendikia, dan tokoh masyarakat setempat. Sedangkan ayat 5 mengatur tentang organisasi pengelolaan zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana. Adapun unsur pertimbangan terdiri atas para Ulama, kaum cendikia, tokoh masyarakat, dan wakil pemerintah, sementara unsur pelaksana terdiri atas unit administrasi, unit pengumpul, unit pendistribusi, dan unit lain sesuai dengan kebutuhan. Untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, dapat dibentuk unit pengumpul zakat sesuai dengan kebutuhan di instansi Pemerintah dan swasta, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Lembaga zakat ini dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah, adapun tugas pokok lembaga zakat adalah mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Agar tugas pokok dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna, badan amil zakat perlu melakukan tugas lain seperti penyuluhan dan pemantauan.

		mustahik yang tinggal di sekitar mereka.	ke seluruh masyarakat Kabupaten Ngawi
3	Pendayagunaan	- Zakat yang didistribusikan bersifat konsumtif.	- Zakat yang didistribusikan bersifat konsumtif dan produktif

masyarakat belum menaruh kepercayaan yang lebih besar kepada masyarakat, dan dikarenakan masyarakat belum begitu mengerti akan tugas dari BAZ.

Hal diatas tidak sesuai dengan Pasal 29 poin C KMA Nomor 373 Tahun 2003 menyebutkan bahwa salah satu tugas BAZ melakukan bimbingan dan penyuluhan, yang mana dalam hal ini belum mampu dilakukan dengan baik oleh BAZ Kabupaten Ngawi, padahal masyarakat merasa senang apabila ada petugas yang membantu mereka dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat.

Menurut penulis tanpa adanya sosialisasi yang baik terhadap seluruh lapisan masyarakat maka, keberadaan BAZ dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tidak akan pernah terlaksana dengan baik, bahkan mungkin tidak akan pernah dikenal oleh semua kalangan masyarakat dan tujuan utama dari zakat. Hal ini juga dapat dilihat dari perubahan pengelolaan zakat sebelum dan pasca adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang belum menunjukkan perubahan yang signifikan.

Senada dengan beberapa permasalahan diatas Ibnu Djarir sebagai wakil ketua Badan Amil Zakat Propinsi Jateng berpendapat, bahwa kurang optimalnya pengelolaan zakat disebabkan oleh, *Pertama*, sosialisasi materi UU tersebut belum meluas ke seluruh lapisan masyarakat hingga akar rumput. *Kedua*, kesadaran sebagian besar masyarakat tentang kedudukan UU dalam suatu Negara masih lemah, padahal UU itu mengikat seluruh warga negara. *Ketiga*, banyaknya panitia model zakat lama yang lebih suka dengan panitia

Sebetulnya zakat yang ada dikabupaten Ngawi jika dimaksimalkan dengan baik dari berbagai kalangan maka akan tumbuh subur terutama untuk penyanturan para dhuafa. sehingga sudah tidak ada lagi kesenjangan sosial dari kalangan dhuafa. sampai saat ini tehnik pengumpulan zakat dikabupaten ngawi masih belum dimaksimalkan dengan memfungsikan lembaga-lembaga BAZ di Kecamatan–Kecamatan maupun di Desa-Desa. Walaupun secara strukturalnya dan di setiap Kecamatan sudah terbentuk lembaga BAZ tingkat Kecamatan dan Desa namun lembaga tersebut seakan mandul tidak ada yangbergerak secara maksimal. karena tingkat sumberdaya manusianya yang ditugaskan di BAZ masih belum menguasai sehingga para muzakki lebih senang menyalurkan zakatnya secara langsung kepada para dhuafa yang mereka kehendaki.

UPZ telah mendistribusikan zakat kepada 8 asnaf, sesuai dengan ketentuan agama, tetapi dalam pendistribusian zakat tidak ada koordinasi dengan tingkatannya masing-masing.

Hal diatas tidak sesuai dengan pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, karena seharusnya BAZ di semua tingkatan dalam menjalankan tugasnya memiliki hubungan kerja yang koordinatif, konsultatif dan informatif. Dalam pasal 9 juga disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya BAZ bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

Dari beberapa hal di atas dapat disimpulkan dari segi Undang-Undang dan Hukum Islam, bahwa pencatatan dan pelaporan merupakan hal terpenting yang harus dilakukan oleh BAZ, yang mana BAZ disini berkedudukan sebagai amil zakat. Dengan adanya pencatatan dan pelaporan maka transparansi kepada publik bisa tercapai, dan yang pasti kepercayaan akan mereka dapatkan dari masyarakat. Karena salah satu asas dari pengelolaan zakat adalah keterbukaan.

Sebagaimana tertuang dalam pasal 4 yang berbunyi : “pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Menurut penulis aturan-aturan yang tercantum dalam Undang-Undang tentang pengelolaan zakat tidak memiliki kekuatan untuk memaksa dan mengikat, karena terlaksana dan tidaknya Undang-Undang ini tidak mempunyai konsekwensi hukum selain yang disebutkan dalam pasal 21 yang menyatakan bahwa setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat dan mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kifarot, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Hal ini masuk dalam sebuah tindak pidana, dan bagi setiap pengelola zakat yang melakukan kesalahan haruslah mendapatkan sanksi.

Dalam pasal 21 tersebut jelas sekali tersebut bahwa bagi setiap pengelola zakat yang lalai ataupun mencatat tapi tidak dengan sebenar-benarnya

akan mendapatkan sanksi hukum, akan tetapi BAZ Kabupaten Ngawi belum menerapkan sanksi yang telah tertera dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Menurut penulis dengan belum dapat dilaksanakannya sanksi dalam pasal ini menyebabkan kurang maksimalnya kinerja dari pengelola zakat, dan akan semakin banyaknya penyelewengan yang terus akan terjadi, sehingga tidak dapat menimbulkan rasa tanggung jawab yang besar dari para pengelola zakat.

Dari beberapa persoalan yang ada penulis dapat menyimpulkan, bahwasanya Badan Amil Zakat di Kabupaten Ngawi belum dapat mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan baik dan benar sehingga terkesan Badan Amil Zakat ini mengedepankan formalitas dari pada profesionalitas. Dan juga kurang tegasnya pemerintah dalam penerapan Undang-Undang ini, sehingga Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ini tidak dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

